



The Effect Of Firm Ownership Moderation On Political Connections With Tax Avoidance

Submitted Date:
15 December 2023

Accepted Date:
05 January 2024

Published Date:
31 May 2024

Taskurun

Airlangga University, Indonesia
taskurun.385750-2022@feb.unair.ac.id

Heru Tjaraka

Airlangga University, Indonesia
heru_tjaraka@feb.unair.ac.id

Muhammad Azis

Makassar State University, Indonesia
mazis@unm.ac.id

*Corresponding Author.

How to cite:

Taskurun, Tjaraka, H., Azis, M. 2024. The Effect Of Firm Ownership Moderation On Political Connections With Tax Avoidance. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 11 Iss 1 pp.115-126.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh moderasi kepemilikan perusahaan terhadap hubungan politik dengan penghindaran pajak di 78 perusahaan manufaktur Indonesia yang terdaftar di BEI antara 2018-2022. Hasil analisis regresi moderasi menunjukkan bahwa hubungan politik berpengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Namun, moderasi kepemilikan perusahaan bervariasi; kepemilikan saham institusional berpengaruh negatif signifikan, sementara kepemilikan saham manajerial berpengaruh positif signifikan. Keterbatasan penelitian meliputi sampel terbatas pada perusahaan manufaktur BEI dan penggunaan data sekunder. Penelitian mendatang sebaiknya melibatkan sektor industri dan ukuran perusahaan yang lebih beragam, data primer, serta metode penelitian yang lebih komprehensif seperti analisis jalur atau eksperimen. Faktor kontekstual dan variabel kontrol tambahan juga perlu dipertimbangkan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh moderasi kepemilikan perusahaan terhadap hubungan politik dan penghindaran pajak di perusahaan manufaktur Indonesia.

Kata Kunci: DER; Political Connection; Ownership institutional; Ownership Managerial; Political Connection; ROA; ROE; Tax Avoidance.

Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan undang-undang perpajakan yang kompleks dan terus berkembang. Di Indonesia, tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 22% (dua puluh dua persen) berdasarkan Pasal 17(1b) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini membuat banyak perusahaan memanfaatkan peluang tersebut untuk menghindari pajak, terutama di sektor manufaktur yang dikenal memiliki margin keuntungan yang tinggi (Margaretha, M. (2019)). Menurut laporan Tax Justice Network, hal ini terjadi di Indonesia karena Tax Fraud diharapkan menghadapi kerugian sebesar 4,86 miliar dolar AS per tahun atau Rp 68,7 triliun (kurs rupiah Rp 14.149 per dolar AS). Dalam headline berjudul "The State of Tax Justice 2020": Keadilan Pajak Selama krisis COVID-19, Berita Keadilan Pajak melaporkan bahwa total kerugian sebesar 68,7 triliun rubel disebabkan oleh penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Kerugian yang ditimbulkan mencapai \$4,78 miliar, atau 67,6 triliun rubel. Sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi sebesar 78,83 juta dolar AS atau Rp 1,1 triliun. Departemen Keuangan telah menetapkan target pajak yang ketat sebesar Rp 1.198,82 triliun untuk tahun 2020. Estimasi penghindaran pajak Dekimian adalah 5,7 persen dari target akhir tahun 2020. Nilai penghindaran pajak diperkirakan mencapai 5,16 persen dibandingkan penerimaan pajak sebesar Rp1,332 triliun pada 2019. ([https://www.kemenkeu.go.id:\(2023\)](https://www.kemenkeu.go.id:(2023))) Penghindaran pajak ini tidak dapat dibenarkan.

Terakhir, pajak digunakan sebagai bentuk bantuan masyarakat dan kemudian dikelola oleh pemerintah sendiri untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Pada saat yang sama, penghindaran

pajak perusahaan dan individu meningkat menjadi 1,09 juta gaji dokter. Terkait dengan insentif kesehatan yang masuk dalam Program Stimulus Ekonomi Nasional atau program PEN, dapat dikatakan penggelapan pajak hingga Rp68,7 triliun dapat menutupi 70,5 persen dari total pagu kesehatan Rp97,26 triliun. Dalam keadaan seperti ini, skala penghindaran pajak sangat besar dibandingkan pagu ekonomi sektoral, kementerian atau lembaga, pemerintah daerah program PEN, total 65,97 triliun rubel, atau 62,22 triliun rubel dalam anggaran perusahaan. Sekadar informasi, menurut laporan State of Tax Justice tahun 2020: Selama masa COVID-19, Kejaksaan Pajak menyatakan India berada di urutan keempat dalam kasus penghindaran pajak wajib pajak badan dan orang pribadi di Asia setelah China, India, dan Jepang. ([https://keadilan.pajak.net/\(2023\)](https://keadilan.pajak.net/(2023))) Pertambangan merupakan industri yang stabil di Indonesia, terbukti dengan banyaknya perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI, dan pada subsektor batubara, minyak dan gas, logam dan mineral, dan batuan. Namun praktek penggelapan pajak oleh perusahaan besar di industri ini seperti PT. Adaro Energy dan PT. Kaltim Prima Coal merugikan negara. Salah satu cara untuk menghindari pembayaran pajak adalah dengan mengubah harga, mengubah laporan keuangan, dan bergabung dengan bisnis yang merugi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk memilih perusahaan pertambangan sebagai target penelitian.

» Kinerja Realisasi Penerimaan Pajak, 2017—2021



Sumber: Laporan Keuangan DJP 2017—2021 (Audited).

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Realisasi pemungutan pajak di Indonesia periode 2017-2021 realisasinya berbeda dari target yang seharusnya. Besarnya realisasi penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan target pajak yaitu pada tahun 2019 pendapatan pajak dari migas sebesar 1.333 dan pph non migas 1.273 untuk tahun 2020 pph migas sebesar 1.072 dan pph non migas 1.039 Target pajak yang tidak tercapai dapat disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh perusahaan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa koneksi politik dan ownership firm dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak suatu perusahaan. Namun, sedikit penelitian yang memperhatikan karakteristik perusahaan sebagai variabel mediasi pada hubungan tersebut. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Hapsari dan Kusumawati (2020), koneksi politik dan ownership firm memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik perusahaan, seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage, juga memiliki peran sebagai variabel mediasi pada hubungan antara koneksi politik dan ownership firm dengan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh koneksi politik dan ownership firm terhadap penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, tetapi juga faktor eksternal seperti hubungan politik dan struktur kepemilikan. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah dan publik terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia.

Beberapa kajian literatur yang diperoleh yang menggambarkan gap research dalam penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan Willison (2009); Lisowsky (2010) menyatakan karakteristik perusahaan yang diukur dengan ukuran perusahaan berpengaruh positif dengan tax avoidance selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Chen dkk. (2010) dengan variabel Ownership Firm dengan pengukuran perusahaan keluarga memperoleh hasil perusahaan keluarga menggunakan lebih sedikit tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Desai dan Dharmapala (2009); Khan dkk. (2017) variabel ownership firm diukur dengan kepemilikan kelembagaan memperoleh hasil kepemilikan kelembagaan berhubungan positif dengan tax Avoidance. Untuk variabel Kim dan Zhang (2016) menemukan bahwa hubungan politik antara bisnis dan pejabat pemerintah membantu menurunkan kemungkinan diselidiki oleh otoritas pajak; perusahaan dengan koneksi politik karena itu dapat lebih aman terlibat dalam penghindaran pajak. Li dan Xu (2013) menemukan bahwa perusahaan China dengan status politik lebih mengejar penghindaran pajak lebih banyak. Hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Yang memperoleh hasil

koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah, L., Aris, M. A., & MM, A. (2015) dengan hasil Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance dibuktikan dengan diperoleh nilai $\text{sig} = 0,285 > 0,05$ hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ghozali, Purwanto, & Chariri, 2016).

Penelitian ini menemukan bahwa political connections berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Namun, ownership structure memoderasi hubungan tersebut, di mana pengaruh negative political connections terhadap tax avoidance menjadi lebih kecil pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar. Hal ini berbeda dengan temuan hasil penelitian (Gracelia & Tjaraka, 2020) yang menemukan hasil penelitian bahwa ownership manajerial tidak berpengaruh pada tax avoidance sebagai variabel moderasi. Berdasarkan fenomena dan gap research yang telah dijelaskan diatas maka saya tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan menguji pengaruh variabel koneksi politik dan terhadap tax avoidance dengan Ownership Firm sebagai variabel mediasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.

Tinjauan Teoritis

Teori Agensi

Teori agensi mengemukakan bahwa dalam suatu perusahaan, terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik (principal) dan manajer (agent) yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan. Dalam konteks penghindaran perpajakan, koneksi politik dapat mempengaruhi perilaku manajemen dalam menghindari pembayaran pajak penghasilan. Pemilik perusahaan mungkin memiliki kepentingan untuk mengurangi beban pajak dan meningkatkan keuntungan, sementara manajer mungkin memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penghasilan pribadi mereka atau memperoleh manfaat pribadi melalui koneksi politik. Dalam teori agensi, kepemilikan perusahaan (ownership firm) berperan sebagai variabel moderasi. Ownership Firm dapat mencerminkan struktur kepemilikan, seperti kepemilikan institusional atau kepemilikan keluarga. Kepemilikan institusional umumnya melibatkan investor institusi seperti dana pensiun, dana investasi, atau perusahaan asuransi. Sedangkan kepemilikan keluarga melibatkan pemilik perusahaan yang merupakan keluarga atau keturunan langsung dari pendiri perusahaan. Ketika Ownership Firm berperan sebagai variabel moderasi, hal ini berarti kepemilikan perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara political connection dan penghindaran perpajakan. Misalnya, jika kepemilikan institusional memiliki peran moderasi, maka kepemilikan institusional yang lebih besar dapat mengurangi pengaruh negatif political connection terhadap penghindaran perpajakan. Hal ini dapat disebabkan karena kepemilikan institusional memiliki tanggung jawab fidusia terhadap pemegang saham dan cenderung mengawasi manajemen perusahaan untuk memastikan kepentingan pemegang saham terpenuhi, termasuk kewajiban pajak. Dengan demikian, teori agensi memandang bahwa pengaruh political connection terhadap penghindaran perpajakan dapat dipengaruhi oleh Ownership Firm sebagai variabel moderasi. Kepemilikan institusional cenderung mengurangi pengaruh negatif political connection terhadap penghindaran perpajakan, sedangkan kepemilikan keluarga mungkin memperkuat pengaruh tersebut.

Teori Sumber Daya (Resource-Based Theory)

Teori ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi lingkungan, termasuk kebijakan pajak. Koneksi politik dan ownership firm dapat memberi perusahaan akses ke sumber daya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pajak yang menguntungkan perusahaan." (Li, 2013) Dalam konteks pengaruh political connection terhadap penghindaran pajak dengan Ownership Firm sebagai variabel moderasi, teori sumberdaya dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut. Pertama, pengaruh political connection terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan melalui akses ke informasi, kekuatan politik, dan jaringan yang luas. Perusahaan dengan koneksi politik yang kuat dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk memperoleh keuntungan dalam penghindaran pajak dengan memperoleh informasi dan perlakuan khusus dari pemerintah. Kedua, Ownership Firm sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan antara political connection dan penghindaran pajak. Misalnya, kepemilikan institusional yang besar dapat mengurangi pengaruh negative dari political connection terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh kontrol yang lebih ketat dari pihak institusional terhadap tindakan perusahaan, termasuk penghindaran pajak.

Teori Asimetri Informasi (Information Asymmetry Theory)

Teori ini dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak karena dalam situasi asimetri informasi, yaitu di mana ada pihak yang memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik daripada pihak lain, terdapat peluang untuk memanipulasi informasi guna mengurangi kewajiban pajak. Hal ini karena pihak yang memiliki informasi lebih dapat menyembunyikan atau mengalihkan aset mereka ke tempat yang sulit dilacak oleh pihak yang memiliki informasi kurang. Dalam hal ini, peran penghindaran pajak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak. Dalam penelitian mengenai pengaruh political connection terhadap tax avoidance dengan Ownership Firm sebagai variabel moderasi, teori asimetri informasi dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa hubungan antara political connection dan tax avoidance dapat terjadi. Sebagai pemegang kendali, manajemen memiliki akses lebih besar terhadap informasi mengenai kebijakan pajak yang berlaku dan bagaimana cara untuk menghindari pajak dengan menggunakan political connection. Sementara itu, pemegang saham dan kreditor mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap informasi tersebut.

Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance

Studi sebelumnya menunjukkan adanya kemungkinan bahwa hubungan politik dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa hubungan politik dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pertama, perusahaan dengan hubungan politik yang kuat dapat memperoleh perlakuan khusus atau preferensial dari pemerintah, termasuk insentif perpajakan yang lebih menguntungkan. (Li et al., 2022). Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pajak secara legal untuk memanfaatkan keuntungan tersebut. Kedua, hubungan politik yang kuat juga dapat memberikan perlindungan atau kekebalan terhadap pemeriksaan dan penegakan hukum terkait pajak, sehingga perusahaan cenderung lebih berani dalam melakukan penghindaran pajak. (Rustiarini & Sudiartana, 2021) Namun, perlu diperhatikan bahwa pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak tidak selalu berlaku secara seragam di semua konteks dan negara. (Zhang, 2017) Faktor-faktor seperti peraturan perpajakan, kebijakan pemerintah, dan praktik korporasi yang berbeda di setiap negara dapat mempengaruhi tingkat pengaruh tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis untuk menguji pengaruh hubungan politik terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan (Tang et al., 2022). Metode penelitian yang dapat digunakan antara lain analisis regresi atau analisis data panel, dengan variabel dependen berupa tingkat penghindaran pajak (misalnya Effective Tax Rate/ETR) dan variabel independen berupa indikator atau ukuran hubungan politik seperti kepemilikan saham oleh pihak-pihak politik atau pengaruh politik dalam kebijakan perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak, serta implikasi kebijakan yang relevan dalam konteks regulasi perpajakan dan transparansi korporasi.

H1= Political Connection Berpengaruh Signifikan Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Moderasi Ownership Institusional terhadap hubungan Political Connection terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan antara political connection (hubungan politik) dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Moderasi kepemilikan institusional mengacu pada pengaruh kepemilikan saham oleh lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau investor institusional lainnya terhadap hubungan antara political connection dan penghindaran pajak. Pada dasarnya, hubungan politik memiliki potensi untuk mempengaruhi penghindaran pajak karena dapat memberikan perlakuan khusus atau preferensial dari pemerintah dalam hal insentif perpajakan atau perlindungan hukum (Suparman et al., 2022). Namun, pengaruh ini mungkin berbeda-beda tergantung pada adanya kepemilikan institusional. Melalui analisis regresi atau analisis data panel, peneliti akan menguji hubungan antara political connection dan penghindaran pajak, serta apakah pengaruh ini dimoderasi oleh kepemilikan institusional. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penghindaran pajak, seperti Effective Tax Rate (ETR), sementara variabel independen utamanya adalah hubungan politik dan kepemilikan institusional. (Eka Putra et al., 2020) Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan apakah hubungan politik memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap penghindaran pajak, dan apakah kepemilikan institusional memoderasi hubungan tersebut (Darsani & Sukartha, 2021). Jika kepemilikan institusional dapat memperkuat pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak, hal ini dapat mengindikasikan adanya ketergantungan pada faktor kepemilikan institusional dalam praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. (Jalali et al., 2020) Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hubungan politik dan kepemilikan institusional berinteraksi dalam konteks penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan dan memberikan wawasan bagi regulator dan praktisi dalam mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan transparan.

H2= Ownership Institusional Memoderasi Secara Negatif dan Signifikan Hubungan Antara Political Connection Terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Moderasi Ownership Manajerial terhadap hubungan Political Connection terhadap Tax Avoidance

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh moderasi kepemilikan manajerial terhadap hubungan antara political connection (hubungan politik) dengan penghindaran pajak (tax avoidance). Moderasi kepemilikan manajerial mengacu pada pengaruh kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan terhadap hubungan antara political connection dan penghindaran pajak. (Arifah & Arieftiara, 2021) Hubungan politik memiliki potensi untuk mempengaruhi penghindaran pajak karena dapat memberikan perlakuan khusus atau preferensial dari pemerintah dalam hal insentif perpajakan atau perlindungan hukum. Namun, pengaruh ini mungkin berbeda-beda tergantung pada adanya kepemilikan manajerial. (Damayanti & Wulandari, 2021) Melalui analisis regresi atau analisis data panel, peneliti akan menguji hubungan antara political connection dan penghindaran pajak, serta apakah pengaruh ini dimoderasi oleh kepemilikan manajerial. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat penghindaran pajak, seperti Effective Tax Rate (ETR), sementara variabel independen utamanya adalah hubungan politik dan kepemilikan manajerial. (Rustiarini & Sudiartana, 2021) Hasil analisis diharapkan dapat menunjukkan apakah hubungan politik memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap penghindaran pajak, dan apakah kepemilikan manajerial memoderasi hubungan tersebut. (Deef et al., 2021) Jika kepemilikan manajerial dapat memperkuat pengaruh hubungan politik terhadap penghindaran pajak, hal ini dapat mengindikasikan adanya peran penting dari manajemen perusahaan dalam praktik penghindaran pajak. (Nailufaroh et al., 2022) Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana hubungan politik dan kepemilikan manajerial berinteraksi dalam konteks penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan dan memberikan wawasan bagi regulator dan praktisi dalam mengembangkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan transparan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman tentang peran manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan perpajakan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

H3 = Ownership Manajerial Memoderasi Secara Positif dan Signifikan Hubungan Antara Political Connection Terhadap Tax Avoidance

Metode

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan jenis Eksplanatori (Nasution, A. F. (2023)). Penelitian kuantitatif Eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Penelitian ini juga menggunakan desain data panel, yaitu mengambil sampel data pada beberapa waktu tertentu. Dalam penelitian ini, sampel diambil dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022.

Berikut Model model regresi dalam penelitian ini dapat dinotasikan sebagai berikut.

1. $TA = \beta_0 + \beta_1PC + \beta_2OF + \beta_3PC \cdot ROA + ROE + DER + \epsilon$
2. $TA = \beta_0 + \beta_1PC + \beta_2OF + \beta_3PC \cdot OFIns + ROA + ROE + DER + \epsilon$
3. $TA = \beta_0 + \beta_1PC + \beta_2OF + \beta_3PC \cdot OFMaj + ROA + ROE + DER + \epsilon$

Keterangan:

TA = Effective Tax Rate

PC = Political Connection

OFIns = Ownership Firm Institutional

OFMaj = Ownership Firm Manajerial

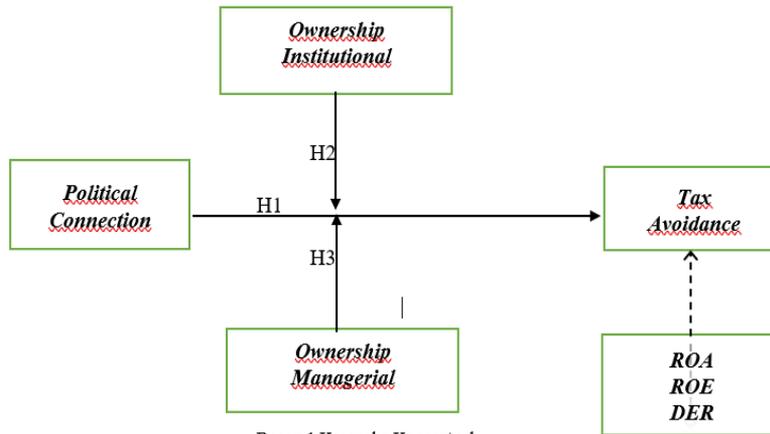
ROA = Return On Aset

ROE = Return On Equity

DER = Debt Equity Ratio

ϵ = Error Term

Rancangan Penelitian



Bagan 1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep penelitian di atas, pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1:** Political Connection berpengaruh signifikan terhadap Harga Pasar Tax Avoidance pada Perusahaan Penambangan Batubara Dan Lignit Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022
- H2:** Ownership Instiusional memoderasi hubungan antara political connection dengan Tax avoidance pada Perusahaan Penambangan Batubara Dan Lignit Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022
- H3:** Ownership Managerial memoderasi hubungan antara political connection dengan Tax avoidance pada Perusahaan Penambangan Batubara Dan Lignit Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022.

Defenisi Operasional dan Pengukuran

Tabel 2. Defenisi Oprasional dan Pengukuran

Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala	Sumber
<i>Political Connection</i>	<i>Political Connection</i> jumlah pejabat aktif dan non aktif pemerintah yang bekerja di perusahaan, yang berperan Penting dalam Pengambilan keputusan Seperti manajer, dewan direksi atau pemilik (Firmansyah et al., 2022)	Dummy: 1: dewan direksi, manajer, pemilik yang pernah mantan pejabat pemerintah 0: untuk Lainnya	Nominal	www.idx.com dan Osiris, serta Sumber lainnya
<i>Ownership Institutional</i>	Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga atau organisasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dana investasi, atau manajer investasi. Kepemilikan institusional terjadi ketika lembaga keuangan tersebut membeli saham dalam jumlah besar sebagai bagian dari portofolio investasi mereka, dan bukan sebagai investasi pribadi individu ((Suparman et al., 2022)	$OI_{ins} = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total Saham Yang beredar}}$	Rasio	www.idx.com dan Osiris
<i>Ownership Managerial</i>	Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga atau organisasi keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dana investasi, atau manajer investasi.	$OM_{aj} = \frac{\text{Total Saham yang dimiliki Manajer}}{\text{Total Saham Yang beredar}}$	Rasio	www.idx.com dan Osiris

Variabel	Defenisi	Pengukuran	Skala	Sumber
	Kepemilikan institusional terjadi ketika lembaga keuangan tersebut membeli saham dalam jumlah besar sebagai bagian dari portofolio investasi mereka, dan bukan sebagai investasi pribadi individu (Rakayana et al., 2021)			
ROE	ROE mengukur tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham perusahaan. ROE dihitung dengan membagi laba bersih dengan total ekuitas perusahaan. (Lin et al., 2011)	$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio	www.idx.com dan Osiris
(DER)	Leverage mengukur tingkat penggunaan hutang oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Dalam analisis keuangan, leverage dapat diukur dengan dua rasio, yaitu debt-to-equity ratio (DER) dan debt-to-assets ratio (DAR). (Salmi & Martikainen, 1994)	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio	www.idx.com dan Osiris
Tax Avoidance (ETR)	Tax avoidance mengacu pada kegiatan bisnis yang dirancang untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur tax avoidance adalah effective tax rate (ETR). (Hanlon & Heitzman, 2010)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio	www.idx.com dan Osiris

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada perusahaan sub sektor manufaktur pertambangan batubara dan lignit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama enam tahun terakhir terhitung sejak 2018-2022, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan yaitu: a)Perusahaan Penambangan batu bara dan lignit yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018-2022 b)Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan tahunan (annual report) dalam satuan Rupiah dan telah diaudit selama periode 2018-2022 c.) perusahaan mempunyai data harga saham penutup (closing price) selama periode tahun 2018 hingga 2022.

Tabel 3. Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022	140
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunannya secara konsisten dan data tidak lengkap	(62)

Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Menggunakan Data Dokumentasi: Menurut Kusumastuti, A., Khoiron, A. M., & Achmadi, T. A. (2020). Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari dokumen resmi perusahaan seperti laporan keuangan tahunan, laporan keuangan kuartalan, dan catatan atas laporan keuangan. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder atau disebut juga secondary data. Teknik pengumpulan data dari basis data dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari IDX (Indonesia Stock Exchange) dan Osiris. Jenis data sekunder yang digunakan adalah data panel merupakan gabungan antara data time series (data runtut waktu) dan cross section (data antar tempat/ruang).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu a) Analisis Statistik Deskriptif; b) Uji Hipotesis yang terdiri dari Analisis Regresi Linear Berganda, Analisis Regresi Moderasi,

Hasil dan Pembahasan

Tabel 4. merupakan hasil uji statistik deskriptif berdasarkan 78 sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 – 2022

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
TA	78	-1.362	1.117	-5.258	3.338
PC	78	.782	.416	0	1
INS	78	50.724	26.73	1.02	91.9
MAJ	78	9.907	17.362	.001	69.57
ROA	78	11.71	21.339	-43.18	69.49
ROE	78	27.788	68.314	-118.7	422.49
DER	78	6.933	9.754	.006	54.648

Pada tabel 4 di atas, nilai TA terendah pada penelitian ini adalah -5,258 sedangkan nilai terbesar adalah 3,338 Nilai rata-rata perolehan TA sebesar -1,362. Untuk PC pada penelitian ini memiliki nilai terkecil 0 dan nilai terbesar yaitu 1. Variabel INS menunjukkan nilai rata-rata 50,724 dengan nilai minimal 1,02 dan nilai maksimal 91,9. Variabel MAJ menunjukkan nilai rata-rata 9,907 dengan nilai minimal 0,001 dan nilai maksimal 69,57. Selanjutnya nilai rata-rata ROA, ROE, dan DER adalah 11,71 dan 27,778, dan 6,933.

Hasil Estimasi dan Verifikasi Hipotesis Penelitian

Tabel 5. Cross-sectional time-series FGLS regression

LnY	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]
PC	4.568	.906	5.04	000	2.793	6.343
INS	.074	.016	4.60	000	.043	.106
MAJ	.072	.015	4.76	000	.042	.102
PCxINS	-.073	.017	-4.38	000	-.105	-.04
PCxMAJ	.079	.016	-4.81	000	.111	.047

ROA	-.03	.011	-2.80	.005	-.051	-.009
ROE	.018	.004	4.04	000	.009	.026
DER	.023	.012	1.89	.059	-.001	.046
Constant	-5.87	.909	-6.46	000	-7.651	-4.089

Mean dependent var -1.362 SD dependent var 1.117

Number of obs 68 Chi-square 89.523

Prob > chi2 0.003 Akaike crit. (AIC) 175.848

R Square 0,543 Adjusted R Square 0,4809

*** $p < .01$, ** $p < .05$, * $p < .1$

Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis 1 diterima. Political Connection penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh positif signifikan dengan nilai signifikansi 0,025 yang lebih besar dari 0,1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, dimana Political Connection berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin besar eksekutif yang memiliki karakter risk taker maka eksekutif perusahaan semakin berani dalam mengambil keputusan yang berisiko, dalam hal ini keputusan penghindaran pajak. Hal ini juga didukung oleh teori eselon atas yang menyatakan bahwa organisasi merupakan cerminan dari para pelaku organisasi, dalam hal ini eksekutif perusahaan. Dalam teori eselon atas juga dikatakan bahwa salah satu faktor utama yang mempengaruhi penafsiran situasi yang akan dijalankan perusahaan adalah pengalaman, nilai-nilai, dan kepribadian para eksekutif, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif perusahaan akan sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Butje and Tjondro (2014); Susanti et al. (2020); Chen et al. (2021); Chaney et al. (2011); Abdul Wahab et al. (2017); (Manihuruk & Novita, 2022); (Mustaqiim & Nurhidayati, 2020); (Abdani & Sya'bania, 2020); (Amalia & Ferdiansyah, 2019); dan (Khlif & Amara, 2019) yang memperoleh hasil temuan bahwa Political Connection berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis 2 diterima. Kepemilikan Institusional penelitian ini menunjukkan bahwa berpengaruh negatif signifikan dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, dimana Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Jika dianalisis, semakin berpengaruh proporsi kepemilikan institusional perusahaan, semakin sedikit keputusan penghindaran pajak perusahaan; Hal ini karena saham yang lebih banyak dimiliki oleh institusi membuat manajer lebih hati-hati dalam perilaku penghindaran pajak. Hasil ini juga sesuai dengan Teori ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi lingkungan, termasuk kebijakan pajak. Koneksi politik dan ownership firm dalam hal ini kepemilikan institusional dapat memberi perusahaan akses ke sumber daya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebijakan pajak yang menguntungkan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Vizandra & Mustikasari, 2021); (Manihuruk & Novita, 2022); (Hasan et al., 2016); (Darsani & Sukartha, 2021); (Anuar et al., 2014); dan (Sonia & Suparmun, 2019) yang menemukan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance

Pengaruh Political Connection terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis 3 diterima. Political Connection yang dimoderasi oleh kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai signifikansi yang menunjukkan angka 0,00 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh Political connection terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan manajerial dalam penelitian ini menjelaskan jumlah persentase yang dimiliki

oleh manajerial dimana semakin tinggi nilai persentasi kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pula keputusan penghindaran pajak. Manajemen atau eksekutif perusahaan dianggap lebih berani mengambil risiko tinggi karena sifat Teori ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi lingkungan, termasuk kebijakan pajak. Koneksi politik dan ownership firm dalam hal in kepemilikan manajerial membuktikan bahwa saham yang banyak dimiliki oleh manajer membuat kecenderungan untuk melakukan penghindaran perpajakan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gracelia & Tjaraka, 2020); (Thai et al., 2023); (Tamburaka et al., 2022); (Yuniarsih, 2018); (Tanko et al., 2022); (Jamei, 2017); (Ardillah et al., 2022); (Sari, 2020) dan (MSEPS et al., 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh terhadap penghindaran pajak karena kepemilikan saham oleh manajer di perusahaan, akan mempengaruhi keputusan atau kebijakan perpajakan. Sehingga hal ini sejalan dengan hubungan yang dihasilkan bahwa kepemilikan manajerial memperkuat hubungan antara Political Connection dengan Tax Avoidance.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa hubungan politik memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di Indonesia (koefisien regresi = 0,000, $p < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan hubungan politik yang kuat cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Selanjutnya Hasil analisis kepemilikan saham institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap hubungan politik dengan penghindaran pajak (koefisien regresi = 0,000, $p > 0,05$). Ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham institusional memperlemah hubungan antara politik dan penghindaran pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan politik dengan penghindaran pajak (koefisien regresi = 0,000 $p < 0,05$). Ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham manajerial yang tinggi dapat memperkuat pengaruh politik terhadap praktik penghindaran pajak. Serta Hasil pengujian terakhir menunjukkan bahwa ROA dan ROE memiliki pengaruh negatif dan positif signifikan dengan (koefisien regresi = 0,000 $p < 0,05$). sedangkan DER tidak berpengaruh terhadap hubungan politik dengan penghindaran pajak. Ini menunjukkan Variabel Kontrol ROA mengurangi pengaruh politik terhadap praktik penghindaran pajak. berbanding terbalik dengan ROE yang memperkuat hubungan sedangkan DER tidak memiliki pengaruh dalam persamaan hubungan ini.

Keterbatasan Penelitian

Generalisasi: Penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian ini mungkin tidak dapat secara langsung digeneralisasi ke perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di BEI atau sektor industri lainnya. Selanjutnya Keterbatasan Data: Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Keterbatasan data seperti keakuratan, konsistensi, atau keterbatasan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Juga penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal Pengukuran Variabel: Pengukuran variabel-variabel dalam penelitian ini, seperti hubungan politik, penghindaran pajak, dan moderasi kepemilikan perusahaan, dapat memiliki batasan dalam keakuratan dan validitasnya. Metode pengukuran yang digunakan mungkin tidak mencakup semua aspek yang relevan. Selanjutnya Masalah Kausalitas: Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel-variabel. Namun, karena sifat penelitian observasional, tidak dapat disimpulkan bahwa ada hubungan sebab-akibat langsung antara variabel-variabel yang diamati dan keterbatasan terakhir yaitu Faktor Lain yang Tidak Diperhitungkan: Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan politik dengan penghindaran pajak, seperti regulasi perpajakan, struktur kepemilikan, atau faktor lingkungan yang lebih luas.

Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Adapun yang peneliti bisa sarankan dalam penelitian ini yaitu Memperluas Sampel: Melibatkan lebih banyak perusahaan manufaktur dari berbagai sektor industri dan ukuran perusahaan yang berbeda. Hal ini akan membantu dalam generalisasi hasil penelitian dan memahami pengaruh moderasi kepemilikan perusahaan secara lebih komprehensif. Selanjutnya Pengumpulan Data Primer: Mengumpulkan data primer melalui survei, wawancara, atau studi kasus untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang hubungan politik, penghindaran pajak, dan kepemilikan perusahaan. Data primer dapat memberikan informasi yang lebih khusus dan akurat tentang variabel yang diteliti. Serta Menggunakan Metode Penelitian Lanjutan: Selain analisis regresi, peneliti dapat mempertimbangkan metode penelitian lainnya seperti analisis jalur, analisis panel, atau eksperimen. Metode penelitian ini dapat membantu dalam memahami hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diamati. Selain itu Mengukur Variabel dengan Lebih Komprehensif: Mengembangkan dan menggunakan pengukuran variabel yang lebih komprehensif dan terperinci, terutama dalam mengukur hubungan politik dan moderasi kepemilikan perusahaan. Hal ini akan meningkatkan keakuratan dan validitas hasil penelitian. Serta Memperhitungkan Faktor Kontekstual: Mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dan hubungan politik, seperti perubahan kebijakan perpajakan, struktur politik, atau

faktor lingkungan bisnis. Selanjutnya Mempertimbangkan Variabel Kontrol Tambahan: Memasukkan variabel kontrol tambahan seperti ukuran perusahaan, tingkat utang, kebijakan dividen, atau kinerja keuangan dalam analisis untuk mengurangi pengaruh faktor-faktor lain terhadap hubungan yang diteliti. dan terakhir Mempertimbangkan variabel mediasi: dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel mediasi sehingga penelitian selanjutnya diharapkan membuat modifikasi variabel mediasi.

Reference

- Abdul Wahab, E. A., Ariff, A. M., Madah Marzuki, M., & Mohd Sanusi, Z. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, 25(3), 424–451. <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Asadanie, N. K., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(1), 14-21. DOI: <http://doi.org/10.25273/inventory.v4i1.6296>
- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). Do political connection, executive character, and audit quality affect the tax avoidance practice? Evidence in Indonesia. *1st International Conference on Applied Economics and Social Science (ICAESS 2019)*, 332–338. DOI: 10.2991/icaess-19.2019.5
- Annuar, H. A., Salihi, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 164, 150–160. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.063>.
- Ardillah, K., Breliastiti, R., Setiawan, T., & Machdar, N. M. (2022). The Role Of Ownership Structure In Moderating The Relationship Between Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility Disclosure, And Firm Value. *Accounting Analysis Journal*, 11(1), 21–30. DOI: <https://doi.org/10.15294/aaj.v11i1.58613>
- Chen, C., & Chen, X. (2019). The Impact of Political Connections on Tax Avoidance: Evidence from Chinese Listed Firms. *Journal of Business*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2022.106940>
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. Dan Shevlin, T. (2010) Apakah Perusahaan Keluarga Lebih Agresif Pajak Daripada Non-Keluarga Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Keuangan* 95(1): 41–61. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect Of Institutional Ownership, Profitability, Leverage And Capital Intensity Ratio On Tax Avoidance. *American Journal Of Humanities And Social Sciences Research (Ajhssr)*, 5(1), 13–22. DOI: <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322>.
- Chaney, P. K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. *Journal of Accounting and Economics*, 51(1–2), 58–76. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.07.003>
- Chen, H., Tang, S., Wu, D., & Yang, D. (2021). The political dynamics of corporate tax avoidance: The Chinese experience. *The Accounting Review*, 96(5), 157–180. <https://doi.org/10.2308/tar-2017-0601>
- Desai, Ma Dan Dharmapala, D. (2009) Penghindaran Pajak Perusahaan Dan Nilai Perusahaan. *Tinjauan Ekonomi Dan Statistik* 91(3): 537–546. DOI: . <https://doi.org/10.1162/rest.91.3.537>
- Faccio, M., Masulis, R. W., & McConnell, J. J. (2006). Political connections and corporate bailouts. *The Journal of Finance*, 61(6), 2597–2635. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2006.01000.x>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS Update PLS Regresi Edisi 7*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gracelia, S., & Tjaraka, H. (2020). Managerial Ownership Moderates The Effect Of Executive Risk Preference And Gender Diversity On Tax Avoidance. *Journal Of Security And Sustainability Issues*, 10(Oct), 484–495. [https://doi.org/10.9770/Jssi.2020.10.Oct\(39\)](https://doi.org/10.9770/Jssi.2020.10.Oct(39))
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2-3), 127-178. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hapsari, I. A., & Kusumawati, A. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(2), 163-174. DOI: 10.33395/pemilik.v7i1.1285
- Hartono, Jogiyanto. 2010. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Edisi ketujuh. Yogyakarta : BPFE
- Hasan, I., Kim, I., Teng, H., & Wu, Q. (2016). *The Effect Of Foreign Institutional Ownership On Corporate Tax Avoidance: International Evidence* (Issue 26/2016). Bank Of Finland Research Discussion Papers. https://Taxjustice.Net/Wpcontent/Uploads/2020/11/The_State_Of_Tax_Justice_2020_English.Pdf
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/konpres-apbn-kita%281%29>

- Indriantoro, Nur dan Supomo, 2002, " Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE
- Khan, M., Srinivasan, S. And Tan, L. (2017) Kepemilikan Institusional Dan Penghindaran Pajak Perusahaan: Bukti Baru. *Tinjauan Akuntansi* 92(2): 101–122. DOI: <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khelif, H., & Amara, I. (2019). Political Connections, Corruption And Tax Evasion: A Cross-Country Investigation. *Journal Of Financial Crime*, 26(2), 401–411. DOI: <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2018-0004>
- Kim, Jb And Zhang, L. (2016) Hubungan Politik Perusahaan Dan Agresivitas Pajak. *Kontemporer Riset Akuntansi* 33(1): 78–114. DOI: <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Lestari, A. P., & Rahmawati, R. (2016). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(3), 449–462. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7036>
- Maitriyadewi, N. L. R. P., & Noviari, N. (2020). Manajemen Laba, Profitabilitas Dan Kepemilikan Keluarga Dan Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1382. <https://doi.org/10.24843/Eja.2020.V30.I06.P04>
- Manihuruk, B. P., & Novita, S. (2022). Penghindaran Pajak: Pengaruh Koneksi Politik Dan Kepemilikan Institusional. *Owner*, 7(1), 391–400. <https://doi.org/10.33395/Owner.V7i1.1285>
- Marfu'ah, L., Aris, M. A., & Mm, A. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). <https://eprints.ums.ac.id/37022/>
- Margaretha, M. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013–2017) (Doctoral Dissertation, Universitas Buddhi Dharma). DOI: <https://doi.org/10.31253/aktek.v11i2.276>
- Marianne Bertrand, Francis Kramarz, Antoinette Schoar, David Thesmar, The Cost of Political Connections, *Review of Finance*, Volume 22, Issue 3, May 2018, Pages 849–876, <https://doi.org/10.1093/rof/rfy008>
- Mustaqim, R. A., & Nurhidayati, N. (2020). The Effect Of Tax Examination Effectiveness On Tax Avoidance With Political Connection Moderation. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 307–325. DOI: <https://doi.org/10.35212/riset.v2i2.64>
- Sari, D. I. (2020). Pengaruh Current Rasio Dan Debt To Equity Ratio Terhadap Harga Saham Perusahaan Otomotif. *Jad : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(1), 66–77. <https://doi.org/10.26533/Jad.V3i1.522>
- Salimun. 2011. "Analisis Variable Moderasi dan Mediasi" Program Studi Statistika FMIPA Universitas Brawijaya: 31-37
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti, A. M. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Risiko Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Bachelor's Thesis, Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Uin Syarif Hidayatullah). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40841>
- Susanti, P. E., Badri, R. E., & Putri, A. S. (2020). Political connection and tax avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(1), 1139–1159. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I1/PR200216>
- Kim, C. F., & Zhang, L. (2015). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78–114. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12150>
- Resti, Y., Arie, F., Andison, & Fauziati, P. (2020). Ownership structure, political connection and tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity Change*, 11(12), 497–512. https://www.ijcc.net/images/vol11iss12/111234_M_2020_E_R.pdf
- Vizandra, E. P., & Mustikasari, E. (2021). Institutional Ownership And Tax Avoidance: Comparative Study In Bumh (Badan Usaha Milik Negara) And Private Companies. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 6(2), 1051–1071. <https://doi.org/10.20473/Jraba.V6i2.130>